

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **A. Latar belakang**

India adalah sebuah negara di Asia Selatan yang menganut sistem kasta/ Strata sosial yang paling rumit di dunia. Istilah 'kasta, pertama kali digunakan oleh orang-orang Portugal untuk menunjukkan klasifikasi sosial di India. Sistem kasta sudah sangat dikenal pada masa kolonial Inggris di India (Swapnil, 2013). Jauh lebih lama dari itu, sistem kasta sebenarnya sudah diterapkan sebelum masa-masa kolonial Inggris, atau lebih tepatnya pada periode Weda pada zaman Brahmana. Sistem kasta juga diyakini telah ada sejak kedatangan orang-orang berbahasa Arya ke India.

Kesadaran berkasta timbul karena orang-orang Arya merasa lebih superior dibanding orang-orang India khususnya dari segi fisik dan keahlian. Keyakinan atas superioritas bangsa Arya memunculkan keyakinan dalam diri orang-orang Arya bahwa manusia sejak lahir sudah ditentukan kastanya. Orang-orang Arya kemudian menyebut mereka berada dalam tiga kasta teratas yaitu Brahmana, Ksatriya, dan Waisya. Sementara itu, orang-orang Dravida dimasukkan dalam kasta terakhir yaitu Sudra (Suwarno, 2012).

Demokrasi menjadi sebuah sistem pemerintahan yang dielu-elukan dewasa ini (Nations, n.d.-a). Demokrasi merupakan cita-cita yang diakui secara universal dan menjadi salah satu nilai inti dari PPB.

Adapun beberapa elemen penting yang menjadi tujuan dari demokrasi itu sendiri, salah satunya adalah munculnya partisipasi politik oleh semua orang. Tujuan tersebut juga merujuk pada kesetaraan terhadap seluruh masyarakat tanpa melihat posisi, kelas, maupun gender. Konsep-konsep politik seperti demokrasi, kewarganegaraan, dan nasionalisme kerap dipandang sebagai konsep yang bersifat netral dan adil. Dalam kenyataannya konsep-konsep itu sangatlah gendered biased (Karram, 1998).

Ketika berbicara mengenai demokrasi, maka bahasan mengenai hak asasi manusia merupakan salah satu cabang pokok yang ikut didiskusikan. Pada nyatanya, hak asasi yang paling mendasar adalah hak-hak politik perempuan, sementara hak asasi manusia itu sendiri merupakan bagian integral dari demokrasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Walby yang mengkritik konsep kewarganegaraan, seperti Lister (1990) dan Pateman (1989), menurut mereka fakta bahwa ketika perempuan belum diperlakukan sebagai warganegara penuh dan sama di demokrasi mana pun, berarti bahwa 'demokrasi tidak pernah ada (Gaus, Gerald F & Kukathas, 2012).

Kesadaran akan munculnya kepincangan sistem sosial masyarakat modern pada tahun 1960-an merupakan akibat budaya patriarki yang kental. Marginalisasi peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya ekonomi dan politik merupakan bukti nyata yang disuguhkan kaum feminis. Demokrasi membutuhkan suara perempuan untuk menjadi sebuah demokrasi yang utuh, dan begitu pula perempuan membutuhkan demokrasi ketika mereka ingin merubah sistem dan hukum yang mengekang mereka, serta kekangan terhadap masyarakat pada umumnya dari

permasalahan kesetaraan. Posisi perempuan yang menempati lebih dari 50 persen penduduk dunia menjadikannya peran yang sangat kuat dalam demokrasi.

Adapun tiga (3) hal mendasar kepentingan yang diperjuangkan oleh kaum perempuan, yaitu: didengar pendapatnya, diakui keberadaannya, dan berada dalam badan legislatif (Nations, n.d.-b). Demokrasi tanpa mengakui suara dan keberadaan perempuan di dunia merupakan demokrasi yang semu. Representasi perempuan diatur dalam artikel *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination againts Women* (CEDAW).

Namun, disisi lain permasalahan keterwakilan perempuan masih saja membelenggu kehidupan politik India. Hingga beberapa kurun waktu terakhir, kuota parlemen India hanya memenuhi hingga 10 persen saja, dan tidak adanya keterwakilan langsung di negara bagian. Demokrasi di India belum sepenuhnya berjalan dengan baik, morat-maritnya kehidupan tatanan sosial, kesenjangan ekonomi, dan perbedaan kasta menjadi hal yang patut diperhitungkan dalam mencapai berjalannya proses demokrasi yang baik. Kuota 33 persen telah diberlakukan di India sejak tahun 1993.

Namun, perkembangan keterwakilan perempuan India di parlemen sejak tahun 1996 sampai 2009 terjadi sangat lamban. Terdapat sebagian dari anggota parlemen menganggap bahwa sistem kuota tidak akan menghasilkan pengaruh positif terhadap representatif politik perempuan. Munculnya figur perempuan dalam parlemen India ternyata belum berhasil meningkatkan jumlah perempuan untuk bisa duduk di parlemen. Pada

nyatanya, perempuan masih menjalankan peran marjinalnya dalam politik.

Kesenjangan atas fenomena sosial politik seperti ini memunculkan upaya yang sangat kuat untuk mencapai pemerintahan demokratis yang layak. Pemberdayaan perempuan dalam beberapa aspek seperti politik, ekonomi, sosial diperjuangkan sehingga perempuan dapat terlibat dalam proses pengambilan kebijakan di parlemen. Meskipun kaum perempuan telah berpartisipasi secara aktif dan memberikan kontribusi berharga dalam berbagai gerakan nasional dan dalam beberapa gerakan massal, mereka tidak maju sebagai pemimpin perempuan dalam hal memegang tampuk kekuasaan, baik dalam badan legislatif maupun partai politik.

Masalah kuota kembali mencuat pada tahun 1995, namun kali ini tertuju pada perempuan dalam parlemen. Pada awalnya, sebagian besar partai politik setuju dengan usulan tersebut. Ketika rancangan undang-undang isu ini diperkenalkan dalam Parlemen XI pada tahun 1997, beberapa partai dan kelompok mengajukan sejumlah keberatan. Hingga kini amandemen tersebut belum disahkan parlemen. Laporan Serikat Parlemen Sedunia menyatakan bahwa kaum perempuan India hanya memegang 7.2 persen kursi di Parlemen Rendah dan 7.8 persen kursi di Parlemen Tinggi.

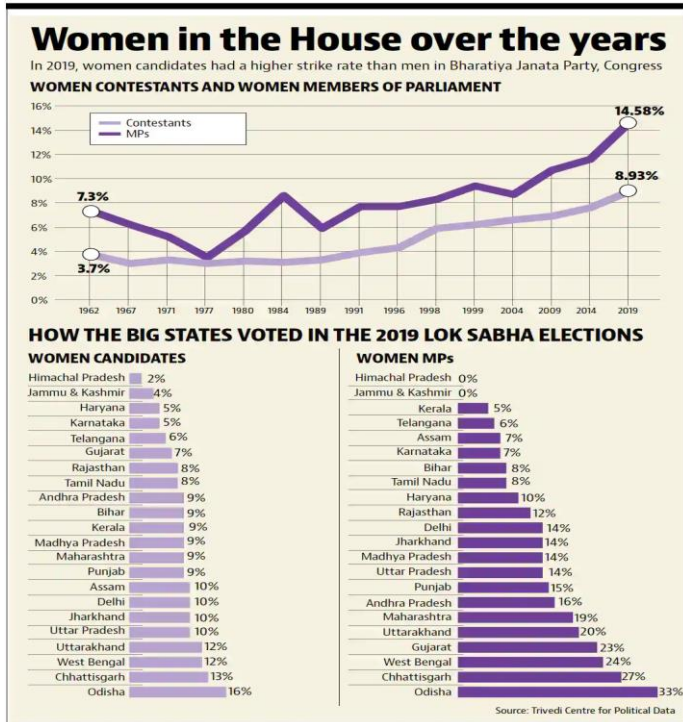
Perwakilan mereka tidak pernah melampaui 9 persen di dalam parlemen, 10 persen di Majelis Negara Bagian, dan 15 persen di Dewan Menteri. Kaum perempuan telah gagal menemukan tempat di dalam badan-badan perwakilan dan pengambilan keputusan. Berbagai negara telah mencantumkan kuota untuk

perempuan ke dalam konstitusinya atau memperkenalkannya melalui legislasi nasional.

Di India, amandemen ke 74 menyatakan bahwa 33 persen kursi dalam badan kotapraja dicanangkan untuk perempuan. Indira Gandhi sebagai salah satu tokoh perempuan yang mengangkat perempuan untuk masuk ke dalam kancah politik sangat tertanam; gerakan kiri juga memobilisasi perempuan. Gerakan perempuan India segera mulai memobilisasi dan mendidik kandidat perempuan (Broockman, 2013). Dan memberikan penyisihan setidaknya sepertiga kursi untuk kaum perempuan sebagaimana juga untuk kedudukan ketua panchayat di segala tingkat, baik desa, distrik, dan pertengahan. Undang-undang untuk menyisihkan sepertiga dari keseluruhan kursi kepada perempuan dilaksanakan di tingkat panchayat dan zilla parishad di semua negara bagian di India tanpa perlawanan dari partai politik manapun juga. Faktanya bahwa, perempuan yang duduk di parlemen hanyalah kaum perempuan yang memiliki kelas strata sosial yang tinggi (Kaum Elite).

Dari segi kasta/strata sosial, bahwa komposisi Lok Sabha ke-17 sama dengan yang ke-16. 155 dari 542 anggota Parlemen terpilih, atau 28,6%, adalah hindu kasta atas/strata sosial tinggi, jumlah yang sama seperti tahun 2014. Jumlah anggota parlemen dari kasta perantara telah berkurang dari 83 menjadi 77 yaitu 14,2% dari parlemen (Gilles Verniers, 2019). Dan adanya penolakan dari beberapa partai politik perihal penetapan quota menjadi isu yang belum selesai dibahas sampai hari ini. Hal itu menjadi salah satu faktor belum terpenuhinya 33 persen kuota perempuan di parlemen India sampai saat ini. Hal itu

pula yang mempengaruhi jumlah kuota perempuan di parlemen India.



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

“Mengapa Keterwakilan Perempuan di India masih Rendah ?”

## C. Kerangka Teori

Untuk menjawab rumusan masalah serta mengapa keterwakilan perempuan di India masih rendah. Maka

dari itu, diperlukan adanya Teori atau konsep yang dapat digunakan sebagai jawaban dari permasalahan yang terjadi. Dalam kesempatan ini penulis akan menggunakan Teori Implementasi Quota.

## **1. Teori Implementasi Quota (Mona Lena Krook)**

Menurut Mona Lena Krook, implementasi kuota gender di sebuah negara dipengaruhi oleh tiga variabel utama yaitu variabel rincian mandat aturan atau undang-undang tentang kuota itu sendiri, kerangka institusional yang melingkupi kuota tersebut dan variabel aktor atau kelompok yang mendukung dan menentang kuota (Krook, 2005).

### **A. Rincian Bunyi Aturan tentang Quota**

Variabel pertama yang mempengaruhi efektifitas implementasi kuota ialah kata-kata yang digunakan dalam aturan tentang kuota. Apakah kata-kata yang digunakan tersebut mendorong implementasi yang tegas, atau kata-kata yang digunakan bersifat ambigu dan tidak tegas, apakah mandat peraturan tentang kuota tersebut memerintahkan secara tegas atau tidak. Apakah peraturan tersebut memuat sanksi jika implementasi kuota tersebut tidak dipenuhi, apakah ada lembaga yang mengawasi pelaksanaan kuota tersebut dan apakah kuota tersebut kuat dan diakui dimata hukum nasional.

Implementasi kuota juga dapat dipengaruhi oleh norma-norma hukum dan konstitusi nasional sebuah negara. Norma-norma legal dan hukum nasional terkadang juga digunakan untuk menentang atau menggugurkan kuota yang diadopsi oleh sebuah negara. Salah satu upaya dapat

dilakukan oleh individu, partai politik, atau pengadilan.

## **B. Kerangka Insitutusal yang melingkupi Implementasi Quota**

Variabel kedua yang mempengaruhi efektifitas implementasi quota adalah kerangka insitutusal yang melingkupinya yaitu karakteristik sistem pemilihan umum dan sistem partai politik di sebuah negara. Penelitian yang dilakukan oleh Htun da Jones (Htun, 2002). Pertama, sifat daftar calon dalam pemilihan umum (Nature of Political Party List). Daftar calon dapat bersifat tertutup yaitu jika nama-nama calon yang diajukan tidak dimunculkan dalam suara pemilu dan terbuka, yaitu jika nama-nama calon dimunculkan dalam surat suara pemilu. Daftar calon yang tertutup terbukti lebih menguntungkan calon perempuan.

Kedua, sifat mandat penempatan calon perempuan. (the existence of placement mandate). Perlu dilihat apakah ada perintah atau mandat untuk menempatkan calon perempuan pada nomor-nomor urut tertentu. Keberadaan mandat ini akan menguntungkan calon perempuan. Sebaliknya jika tidak ada perintah penempatan yang jelas maka implementasi quota akan tidak efektif.

Ketiga, sifat luasan daerah pemilihan (district magnitute) semakin luas atau semakin besar daerah pemilihan maka akan semakin menguntungkan calon perempuan. Sebaliknya semakin sempit atau semakin kecil daerah pemilihan maka akan semakin merugikan calon perempuan. Dalam sistem single member distrik



hanya terdapat satu kursi pada setiap daerah pemilihan sehingga persaingan dalam partai sangat sengit dan calon perempuan cenderung tersingkir.

### **C. Variabel Aktor dalam Implementasi Quota**

Aktor-aktor politik yang berpengaruh terhadap pengadopsian maupun implementasi quota tersebut dapat tersebar dalam empat lokasi, yaitu the base, civil society, the state dan international organization dan transnational civil society.

Pada level base yang bertindak sebagai aktor adalah sejumlah penduduk atau warga negara di sebuah negara. Pada level civil society yang bertindak sebagai aktor adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang membentuk sebuah gerakan partai-partai politik. Pada level ini, aktor yang mendukung quota pada umumnya adalah masyarakat yang tergabung dalam CSO, organisasi-organisasi perempuan baik yang berada dalam partai maupun diluar partai yang menekan elit partai agar melaksanakan quota (Levenduski, Joni and Pippa Norris, 1993).

Pada level state juga terjadi perjuangan gender. Pada level internasional juga terdapat sejumlah aktor yang aktif mewujudkan kesetaraan gender seperti organisasi-organisasi internasional dan transnasional civil society. Pada keempat level atau lokasi tindakan ini terdapat peluang-peluang bagi perempuan maupun laki-laki untuk mempengaruhi proses pembuatan maupun implementasi kebijakan.

#### **D. Hipotesis**

Keterwakilan perempuan di India masih rendah, dikarenakan adanya beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi, yaitu :

- A. Berdasarkan nilai, norma dan kepercayaan yang berlaku serta dipengaruhi oleh Kentalnya budaya patriarki dalam politik mengakibatkan dunia politik diorganisir sesuai dengan norma dan nilai laki-laki, yang berdampak terhadap penyeleksian kandidat.
- B. Negara India menerapkan Sistem Single Member Distric, yang dimana itu menciptakan persaingan dalam partai sangat sengit dan calon perempuan cenderung tersingkir.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan sebagaimana uraian penjelasan diatas dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui permasalahan atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kaum perempuan di India dalam mendapatkan hak-hak nya dalam berpolitik dan ikut andil dalam proses pengambilan kebijakan politik.
- 2) Untuk mengetahui sistem politik yang berlaku di India, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh budaya patriarki yang berlaku di India dalam proses pencalonan politik atau calon kandidat perempuan dalam partai.

#### **F. Metode Penelitian**

1. Jenis dan Sumber Data

Dalam penyusunan proposal skripsi ini membutuhkan data yang dapat digunakan untuk menganalisa masalah yang dihadapi. Data yang diperoleh adalah data sekunder dari bahan-bahan tertulis yang bisa dipertanggung jawabkan.

## 2. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dengan cara mempelajari artikel-artikel, beberapa buku, jurnal, *browsing* di internet dan litelatur-litelatur lainnya yang dapat membantu secara relevan selama proses pembuatan skripsi ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari empat bab yang akan digunakan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan penelitian. Keempat bab tersebut antara lain

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini akan menjabarkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori dan implementasi teori yang membantu penulis dalam menyusun analisa yang bersangkutan dengan hipotesa, hipotesa sebagai kesimpulan sementara dari masalah tersebut, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II PEMBAHASAN**

Bagian ini akan membahas tentang gambaran secara umum perihal posisi perempuan dalam kelas sosial masyarakat India, seberapa besar keterlibatan perempuan dalam bidang politik, serta partisipasi dan pengaruhnya di dalam setiap kebijakan yang di buat oleh pemerintah India.

### **BAB III**

Bagian ini akan membahas tentang gambaran secara umum perihal nilai, norma dan kepercayaan yang berlaku serta dianut oleh masyarakat India, laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan . Menjelaskan secara umum perihal sistem pachayat, menjelaskan perihal sistem pachayat, Sistem politik (*Single Member Distric*), Serta menjelaskan pengaruh kentalnya budaya patriarki yang mengakibatkan dunia politik seringkali diorganisir sesuai dengan norma dan nilai laki-laki, yang berdampak terhadap penyeleksian kandidat perempuan itu sendiri.

### **BAB IV PENUTUP**

Bagian ini merupakan penulisan skripsi yang memaparkan tentang inti dari materi skripsi sebagai penutup yang berisikan kesimpulan.